

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penetapan harga jual gas LPG 3kg di tingkat pangkalan Kecamatan Tatah Makmur telah menetapkan dan menjual dengan harga yang sesuai mekanisme pasar. Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas LPG menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu menghitung biaya transaksi, transportasi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan.
2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Jual Gas Lpg 3 Kg Di Pangkalan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, dapat di toleransi. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 18.500/tabung berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Selatan NOMOR 188.44/ 0385 /KUM/2022, Dalam konsep Ekonomi Syariah aktivitas tersebut dikenal dengan istilah tas^{ir}. Tas^{ir} merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman.

B. Saran

1. Kepada pemilik pangkalan, disarankan agar lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik penetapan harga kepada masyarakat. Prinsip keterbukaan dan musyawarah hendaknya dijaga dalam berinteraksi dengan konsumen, pemilik pangkalan juga dapat mengajukan keluhan atau permohonan kepada Pertamina atau pemerintah daerah agar distribusi

mereka difasilitasi atau diberi subsidi distribusi tambahan, jika memungkinkan.

2. Kepada masyarakat, diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan turut serta mengawasi jalannya distribusi LPG di wilayah mereka. Kesadaran kritis masyarakat sangat diperlukan agar subsidi yang telah diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak. Masyarakat juga bisa mendorong terbentuknya forum komunikasi konsumen di tingkat desa atau kelurahan, agar dapat menampung aspirasi dan menyampaikan keberatan kepada pemerintah secara kolektif.
3. Kepada para peneliti dan akademisi, penulis mengusulkan agar ke depan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada perbandingan wilayah distribusi LPG 3 kg antara daerah terpencil dan daerah perkotaan. Penelitian kuantitatif dengan data lebih luas juga dapat membantu mendorong perubahan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta merumuskan pendekatan distribusi LPG subsidi yang lebih adil dan manusiawi.